

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR**



MASLINDA PAPUTUNGAN

2014.237.00.111

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

MAKASSAR

2018

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR**

Disusun dan diajukan oleh

MASLINDA PAPUTUNGAN

2014.237.00.111

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Publik**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

MAKASSAR

2018

**SKRIPSI
PENGESAHAN**

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

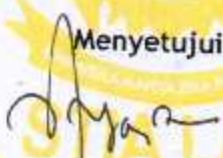
Disusun dan Diajukan Oleh

MASLINDA PAPUTUNGAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.237.00.111


Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 5 Oktober 2018
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,


Ahsan Anwar, S.E., M.Si.
Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar


Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL **PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR**

Pada hari ini, Jumat 5 Oktober 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama **Maslinda Paputungan** dengan Nomor Pokok 2014.237.00.111

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

Ketua Tim : Dr. Muttaqin, MBA

Sekretaris : Irawaty Amir, S.E., M.M.

Anggota : Ahsan Anwar, S.E., M.Si.







 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MAKASSAR	No. Dokumen	SMM-FM-AKD-12.09
	Revisi	0
	Tanggal Efektif	13 Agustus 2018
	Halaman	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TESIS		

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya:

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI/TESIS*), saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1)/MAGISTER (S2)*) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 5 Oktober 2018
Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

AF434AFF284526413

6000
ENAM RIBU RUPIAH



MAKLINDA PAPUTUNGAN

NPM. 2014. 239.00.111

Catatan *)coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillahirrabil'alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq, hidayah dan anugerah-NYA dan shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga skripsi yang berjudul: "Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur" ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan kurikulum strata-1 (S-1) pada program ilmu administrasi publik, konsentrasi administrasi keuangan negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis merasa masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam skripsi ini. Namun penulis merasa sangat terbantu karena memiliki keluarga, sahabat dan dosen pembimbing yang memberikan kontribusi yang tidak ternilai. Dengan segala bantuan, bimbingan dan doa restu sampai tersusunnya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D selaku ketua STIA-LAN Makassar, atas kesempatan yang diberikan untuk menimba ilmu di instansi pendidikan ini.
2. Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik STIA-LAN Makassar, dan selaku penasehat akademik selama masa perkuliahan, terima kasih atas arahan dan dukungan dalam proses pemilihan topik penelitian, dan

penentuan pembimbing.

3. Bapak Ahsan Anwar, S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing tercinta. Terima kasih Pak, atas segala kesabaran, bimbingan, ilmu yang diberikan, motivasi, doa, semangat dan pengalaman yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis selalu mendapat ilmu baru dan skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin.
4. Bapak Bupati Bolaang Mongondow Timur Bapak Sehan S. Landjar, SH yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan S-1 di STIA LAN MAKASSAR.
5. Bapak Drs. Hi, Rudy Suardi Malah, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, atas izin untuk melakukan penelitian.
6. Oskar Manoppo SE, MM selaku kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, atas izin untuk melakukan penelitian.
7. Kepada Dosen dan Civitas Akademik STIA LAN Makassar yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua teman-teman pegawai yang ada di Dinas Sosial dan Badan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
9. Kepada Suami dan anak-anak ku Tercinta dan Tersayang Ruslan Larung dan Muh. Alif Fikram Wardana, Al Fitri Egy Diah Putri, Firdayanti Putri Pratiwi yang telah memeberikan cinta, dukungan,

motifasi dan doa kepada saya dari awal sampai pada akhir perkuliahan serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepada kedua orang tua tercinta, Almarhum Papa Musa Paputungan, dan Mama Hayriah Paputungan, tersayang. Terima kasih untuk selalu menguatkan dalam setiap lantunan doa. Keringat, jasa dan pengorbanan untuk selalu memberikan terbaik untuk penulis, menopang dengan pelukan hangat ketika penulis terjatuh dan ingin menyerah, membangkitkan semangat motivasi dan dukungan untuk selalu mengingatkan impian-impian yang ingin diwujudkan kepada penulis. Alhamdulillah terima kasih ya Allah Engkau telah menganugerahkan orangtua terbaik. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, perlindungan, dan limpahan kasih sayang-NYA kepada kedua beliau. Amin. kakak Hendra Paputungan, dan adek Sudiana Paputungan, Peri Paputungan yang mana telah memberikan banyak cinta dan kasih sayang, dukungan, do'a dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang selama ini saya tempuh.

11. Kepada Kedua Mertua saya, Almarhum Hi. Muh. Larung, Hj. Halidah, Adik Ipar Rusman, Rosmiati, Rosmawati, yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada saya selama ini.

12. Kepada sahabat saya Meylani Tando dan Siti Fatimah Paputungan yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

13. Terakhir teruntuk teman - teman angkatan 2014 STIA – LAN

Makassar khususnya teman-teman tugas belajar dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Siti Fatimah Papatungan, Meilani Tando, Serly Ristiawanti Sridewi Linu, Hardiyansa Alhabsyi dan Alm. Supriadi Nusi yang telah memberikan dukungan dan masukan yang tiada hentinya sampai pada akhir perkuliahan ini.

14. Teruntuk semua keluarga, kerabat dan saudara yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terima kasih untuk selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi dengan sebaik mungkin.

Kesempurnaan hanya Milik Allah SWT, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tapi besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi yang membutuhkan, Amin.

Makassar, 2018

Penulis

(Maslinda Papatungan)

INTISARI

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Penulis : Maslinda Papatungan

Pembimbing : Ahsan Anwar, S.E, M.Si

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum menjelaskan secara detail dalam memberikan bukti dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Selain itu sistem akuntansi keuangan basis akrual pada sektor publik ini masih tergolong baru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan interpretif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk mengungkap makna atau esensi terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Fenomena tersebut sarat dengan keperilakuan, sikap dan pandangan manusia sehingga sangat tepat untuk diteliti dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan basis akrual telah dipahami oleh penyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang jelas, komunikasi yang efektif, sarana dan prasarana penunjang yang memadai tetapi kesiapan sumber daya manusia dibidang akuntansi belum memadai, sedangkan sumber daya manusia merupakan salah satu aspek-aspek penentu keberhasilan penerapan basis akrual. Walaupun demikian Penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berjalan secara efektif dan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan.

Kata Kunci: Penerapan akuntansi berbasis akrual, akuntabilitas, transparansi pelaporan keuangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Teori.....	10
1. Konsepsi Akuntansi	10
2. Konsep Basis Akrua.....	24
3. Dasar Hukum Akuntansi Berbasis Akrua.....	27
4. Kebijakan Pelaporan Keuangan.....	28
5. Kebijakan Akuntansi	30
B. Deskripsi Fokus Penelitian	31
C. Kerangka Konsep.....	32
D. Pertanyaan Penelitian	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Desain Penelitian	34
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	38
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
A. Deskripsi Singkat Lokus Penelitian/Objek Penelitian	44
B. Karakteristik Sumber Data	54
C. Hasil Analisis Data	56
BAB V PEMBAHASAN	85

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1	4
Tabel 2	18
Tabel 3	21
Tabel 4	37
Tabel 5	41
Tabel 6	47
Tabel 7	57
Tabel 8	57
Tabel 9	80

Daftar Gambar

Daftar Gambar 1	33
Daftar Gambar 2.....	46
Daftar Gambar 3.....	54
Daftar Gambar 4.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam satu dasa warsa terakhir seiring dengan tuntutan akan peningkatan kualitas laporan keuangan demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai penyesuaian penatausahaan dilakukan demi mendukung perubahan tersebut. Salah satu kunci dalam perubahan tersebut adalah dikembangkannya kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005.

Dengan terbitnya SAP ini semakin mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan yang juga menandai dimulainya babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan Pemerintah Indonesia.

Peraturan Pemerintah tersebut masih bersifat sementara karena sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Disebutkan bahwa selama pengajuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya disebut PP Nomor 71 Tahun 2010) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana tercantum dalam lampiran II dapat dilaksanakan selama jangka waktu 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010 yaitu sampai Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual, menurut PP No. 71 Tahun 2010 Basis akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang dianut oleh suatu entitas, yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui/dicatat dalam suatu sistem pelaporan keuangan.

Secara umum terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas

(*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Namun dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, dikenal basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yang menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, serta menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Akuntansi berbasis kas adalah suatu basis akuntansi yang mengakui transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya kas masuk dan kas keluar, serta diukur berdasarkan kas masuk dan kas keluar. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi yang mengakui, mencatat dan menyajikan transaksi ekonomi serta peristiwa lainnya dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode.

Contoh Akuntansi Berbasis Kas :

Disini bisa di ilustrasikan perbedaan antara akuntansi berbasis akrual dan berbasis kas sebagai berikut :

Pada 1 Mei 2014 Dinas Sosial membayar sewa gedung sebesar Rp 10.000.000,- untuk dua bulan sewa.

Tabel 1
Tabel Akuntansi Berbasis AkruaI dan Berbasis Kas

Akuntansi Berbasis Kas	Akuntansi Berbasis AkruaI
1 Mei 2016	1 Mei 2016
Beban Sewa	Sewa dibayar dimuka
: Rp. 10.000.000,-	: Rp. 10.000.000,-
Kas	Kas
: Rp. 10.000.000,-	: Rp. 10.000.000,-

Sumber : Bagian Keuangan Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow Timur

Dari contoh diatas dapat dilihat bahwa penggunaan *metode cash basis* dilakukan dengan prinsip bahwa setiap transaksi dicatatkan berdasarkan jumlah nominal yang diterima, sedangkan pada *akruaI basis* memperlihatkan pembayaran yang dilakukan terhadap sewa gedung tersebut dengan nominal Rp 10.000.000,- tidak dikategorikan sebagai beban yang terjadi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah menggunakan basis akruaI mulai tahun 2015. Penerapan basis akruaI memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun tujuh komponen laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan-saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pelaporan keuangan merupakan media komunikasi penting bagi organisasi sektor publik khususnya pemerintah. Pelaporan keuangan

laporan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban atas anggaran dan pengalokasian sumber daya yang digunakan. Oleh karena itu secara spesifik laporan keuangan harus dapat mencerminkan kualitas kinerja Pemerintah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersifat baik, misalnya pelayanan jasa kepada publik secara prima, peningkatan profesionalisme dalam menggunakan sumber daya yang dipercayakan dari masyarakat dan praktik bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peranan laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas kepada publik telah mendorong pemerintah untuk senantiasa secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Transparansi dan kualitas anggaran Pemerintah berperan vital sebagai upaya untuk membangun kualitas demokrasi dan pemerintahan yang efektif. Pemerintah yang efektif merupakan salah satu indikator dalam peningkatan kualitas kemakmuran masyarakat dalam suatu negara.

Selain itu pelaporan keuangan mempunyai tujuan umum yang berkaitan dengan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya ekonomi yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, dan risiko akan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga memberikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan apakah sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk

batas anggaran yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Topik mengenai peranan akuntansi keuangan basis akrual pada sektor publik menarik untuk diteliti karena konsep ini masih tergolong baru. Basis akrual merupakan salah satu isu terhangat yang dihadapi oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia mengingat dengan dikeluarkan PP No 71 Tahun 2010 yang mengharuskan pada tahun 2015 pada sektor publik terutama di instansi Pemerintah sudah harus melakukan adopsi basis akrual secara keseluruhan.

Fenomena di Indonesia, upaya untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi akuntansi yang akurat dan transparan telah dilakukan sejak dikeluarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Setelah itu, dilanjutkan dengan dikeluarkannya UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa Pemerintah Daerah yang belum menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat itu.

Penelitian mengenai akuntansi berbasis akrual di sektor publik terdapat beberapa kelemahan diantaranya adalah belum menjelaskan secara detail dalam memberikan bukti dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Selain itu penelitian mengenai akuntansi berbasis akrual dilakukan di negara-negara yang menjadi pelopor sistem akuntansi berbasis akrual terutama di Negara Italia juga belum dapat mengungkapkan manfaat riil dari implementasi tersebut.

Fokus riset yang akan diangkat pada penelitian ini adalah implementasi mengenai akuntansi berbasis akrual mampukah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk mengungkap makna atau esensi terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Fenomena tersebut sarat dengan berperilaku, sikap dan pandangan manusia sehingga sangat tepat untuk diteliti dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Inti dari paradigma interpretif adalah memahami bentuk fundamental dari dunia sosial pada tingkat pengalaman subjektif seseorang. Paradigma interpretif lebih menekankan pada makna seseorang terhadap simbol.

Pencatatan akuntansi dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual masih sangat baru di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan akuntansi berbasis akrual perlu dilakukan pembahasan secara komprehensif mengingat masih banyak instansi Pemerintah dalam tahap kesiapan dan pengaplikasian pendekatan baru ini. Penelitian ini melakukan kajian mendalam untuk menganalisis manfaat riil implementasi basis akrual sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Atas dasar tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan instansi Pemerintahan terutama di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua dalam meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya Dinas Sosial ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana akuntansi keuangan berbasis akrua dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya Dinas Sosial.

Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan temuan-temuan yang bersifat lokal berkaitan dengan penerapan akuntansi keuangan berbasis akrua dalam pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dipilih sebagai setting penelitian.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian tentang system akuntansi keuangan basis akrual diharapkan dapat memberikan inspirasi dan wawasan bagi pengembangan penelitian selanjutnya terutama bidang akuntansi sektor publik atau pemerintahan.

2. Manfaat praktis

Bagi instansi pemerintahan atau SKPD terkait dapat digunakan untuk menambah informasi dan dapat dijadikan masukan serta evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan system akuntansi keuangan basis akrual secara penuh di tahun 2017.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Menurut Halim dan Kusufi (2012:36) menyatakan bahwa

Akuntansi sebagai aktivitas jasa, yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, mengenai entitas yang dipandang akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan pilihan yang tetap diantaranya alternatif tindakan.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Dilihat dari segi fungsinya, akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi di antara berbagai alternatif tindakan.

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu cabang dari bidang akuntansi. Pada dasarnya akuntansi pemerintahan adalah sama dengan bidang akuntansi lainnya, perbedaan terletak pada obyek yang dipelajarinya. Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan mencari laba.

Menurut Halim (2008 : 48) “Dalam akuntansi dikenal istilah proses pengakuan, yaitu penentuan saat dicatatnya suatu transaksi”.

Menurut Marwanto Harjowiryo, dkk., (2014 :.6)

Untuk menentukan suatu transaksi dicatat digunakan berbagai basis/dasar akuntansi. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.

Menurut Halim (2008:87) Terdapat dua dasar pengakuan pokok, yaitu “Basis Kas dan Basis Akrua, serta dasar pengakuan yang merupakan transisi, yaitu Basis Kas Modifikasian dan Basis Akrua Modifikasian”.

Menurut Arif (2009 : 11) mendefinisika akuntansi yaitu :

Akuntansi sebagai aktivitas pemberian jasa (*service activity*) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna (*user*) dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukakn proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

b. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara

lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur dan donator, analisis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah (Nurlan, 2009:77).

Pemerintah Daerah pada saat ini telah dituntut untuk bisa menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban yang memiliki nilai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Untuk dapat menghasilkan Laporan Pertanggungjawab (LPJ) tersebut tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, disertai dengan pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang membutuhkan waktu lama, dengan tumpukan dokumen yang memenuhi tempat, kini dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), waktu penyusunan menjadi lebih singkat dan tidak perlu menumpuk dokumen begitu banyak, karena dibantu oleh otomatisasi dan sistem digital.

Menurut Halim (2008:35) akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai berikut :

Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Nordiawan (2006:5) Berdasarkan pengertian akuntansi pemerintah daerah maka Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah

Serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Prosedur yang dimaksudkan disini adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi. Yang dimaksud dengan pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi yaitu dengan menggunakan satuan uang. Proses tersebut menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu.

Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi. Dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu asumsi dasar dalam akuntansi yang penting. Hal ini disebabkan asumsi ini menentukan kapan pencatatan suatu transaksi dilakukan, yang tidak dikenal dalam tata buku keuangan daerah selama era pra reformasi keuangan daerah.

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 (2006:76) yang

terdapat pada pasal 232 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah merupakan :

Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan computer.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Sehingga dimensi dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD),
2. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD),
3. Sistem Akuntansi Sumber Daya Manusia, dan
4. Sistem Teknologi Informasi.

Namun untuk menyusun sistem akuntansi sektor publik, menurut Bastian (2007:31) perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu :

1. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.
2. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip - prinsip

pengawasan internal.

3. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan. Hal ini berarti biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal. Dengan kata lain, penyelenggaraan sistem akuntansi perlu mempertimbangkan biaya versus manfaat (*cost versus benefit*) dalam menghasilkan suatu informasi.

Menurut Nurlan (2009:77) Sistem Akuntansi keuangan daerah adalah

Suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur dan donator, analis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Sistem pencatatan yang dilakukan dalam akuntansi keuangan daerah tidak jauh berbeda dengan pencatatan akuntansi lainnya. Pada dasarnya kita perlu mengidentifikasi transaksi ekonomi, apakah transaksi tersebut bersifat ekonomi atau tidak. Transaksi ekonomi ialah aktivitas yang ada hubungannya dengan uang.

Setelah melakukan pengidentifikasian langkah selanjutnya ialah pengukuran transaksi ekonomi dengan satuan uang, jadi setiap transaksi yang ada harus dinyatakan dalam nilai mata uang yang berlaku (rupiah).

Selanjutnya adalah pencatatan transaksi serta pengolahan data menjadi sebuah informasi yang diperlukan. Informasi tersebut kemudian disusun menjadi sebuah laporan keuangan pemerintah daerah. Umumnya berikut ini laporan keuangan dalam pemda :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran

- 2) Laporan Neraca
- 3) Laporan arus kas
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan

c. Pokok-pokok Penerapan SAP Berbasis Akrua

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual, Paragraf 21 Laporan keuangan yang baik adalah yang disusun berdasarkan SAP. Pokok pokok penerapan SAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang perlu diketahui untuk menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi akrual, sebagai berikut :

1) Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga dilingkungan pemerintah pusat;
- d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2. Peranan Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual

Paragraf 25 :

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

3. Komponen Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual,

Paragraf 28 : Laporan keuangan pokok terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berikut ini adalah perbandingan komponen laporan keuangan pada basis Kas Menuju Akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Basis Akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Tabel 2
Perbandingan Komponen Laporan Keuangan Pada Basis Kas Menuju Akrual Yang Diatur Dalam PP No. 24 Tahun 2005 Dengan Basis Akrual Yang Diatur Dalam PP No. 71 Tahun 2010

PP Nomor 24 Tahun 2005	PP Nomor 71 Tahun 2010
<p>Berdasarkan Paragraf 25 Kerangka Konseptual, Laporan Keuangan pokok terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Neraca; 3. Laporan Arus Kas (LAK); 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 	<p>Berdasarkan Paragraf 28 Kerangka Konseptual , Laporan Keuangan pokok terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Laporan Perubahan SAL (LP SAL); 3. Neraca; 4. Laporan Operasional (LO); 5. Laporan Arus Kas (LAK); 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Akuntansi Pemerintahan menurut Baswir (1998,7) adalah

Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk

lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba.

Kemudian Bastian (2001:6) menjelaskan tentang pengertian Akuntansi Sektor Publik adalah

Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Berdasarkan pengertian diatas, akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan/ lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang utuh.

d. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip - prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. (<http://www.wikiapbn.org/standar-akuntansi-pemerintahan/>)

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis

yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

SAP Berbasis AkruaI tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka KonseptuaI Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka KonseptuaI Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis AkruaI dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penyusunan SAP Berbasis AkruaI dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Menurut Mahmudi (2011 : 103) “Standar Akuntansi menjadi kriteria audit bagi auditor sebagai dasar untuk menilai apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku”.

Menurut Bastian (2010:137) “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*.

Meskipun penerapan akuntansi berbasis akruaI telah dicanangkan, PP 71 tahun 2010 masih memberikan ruang bagi untuk menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akruaI. Penerapan SAP berbasis akruaI akan dilakukan secara bertahap, mulai dari

penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual pada tahun 2015. *Timeline* strategi penerapan SAP berbasis akrual yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Timeline Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual

Tahun	Strategi Penerapan SAP Akrual
2010	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual • Mengembangkan <i>framework</i> Akuntansi Berbasis Akrual dan BAS (Badan Akun Standar) • Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan aturan pelaksanaan akuntansi • Pengembangan sistem akuntansi dan teknologi informasi bagian pertama (proses bisnis dan detail requiremen). • Pengembangan kapasitas SDM
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem akuntansi dan teknologi informasi • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	<ul style="list-style-type: none"> • Piloting beberapa Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara • <i>Review</i>, evaluasi dan penyempurnaan sistem • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Parallel run</i> dan konsolidasi seluruh LK • <i>Review</i>, evaluasi dan penyempurnaan system • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi penuh • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber : Rakhman, Azwar.dkk. Penyajian LKPP berdasarkan SAP Berbasis Akrual

e. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun tujuan standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Bastian (2010:138) tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah: "Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah"

Sedangkan menurut Nurlan (2008:39) mengemukakan bahwa:

Standar akuntansi pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

f. Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun kedudukan standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh Bastian (2010:139) sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada penerapannya, muncul kebutuhan akan upaya pengharmonisasian berbagai peraturan baik di Pemerintah pusat maupun di Pemerintah daerah dengan SAP.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, setiap pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan standar akuntansi pemerintah daerah.

Dengan demikian, dari pemaparan diatas dapat penulis artikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan pemerintahan yang diterapkan di

lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum yang diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan.

Seluruh instansi daerah dapat mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintahan daerah dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

g. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun ruang lingkup standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh Nordiawan (2007:123) mengemukakan bahwa:

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah, daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah

Sementara menurut Bastian (2010:139), ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut:

SAP ditetapkan di lingkup pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dapat dikatakan bahwa ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintahan adalah pemerintah pusat dan daerah serta organisasi

dilingkungan pemerintah pusat/daerah.

h. Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Bastian (2010:140) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian laporan keuangan terdiri sebagai berikut:

- 1) Basis akrual
- 2) Komponen laporan keuangan
- 3) Periode pelaporan

2. Konsep Basis Akrual

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah

Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Halim dan Kusufi (2012: 53) menyimpulkan bahwa “Basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan”.

Beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain Bastian (2010: 120):

1. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat.
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
3. Dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal.
4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

Basis Akrual adalah penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya, bukan pencatatan pada saat pendapatan

tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (*Cash Basis*).

Ada dua metode pencatatan akuntansi, berbasis kas dan berbasis akrual. Akuntansi berbasis kas berarti hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas.

Akuntansi berbasis akrual selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan menggunakan basis akrual lebih kompleks daripada basis kas.

Lebih jauh lagi, basis akrual mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian. Karena pada basis kas, pembayaran hanya direkam jika hal itu telah dilakukan, sementara pembayaran kewajiban dapat dilakukan dengan jarak waktu tertentu setelah timbulnya kewajiban itu sendiri. Untuk alasan penganggaran, organisasi dapat lebih baik menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah

Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Halim dan Kusufi (2012: 53) menyimpulkan bahwa Basis akrual "Mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan".

➤ **Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat

(8) menyatakan bahwa

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Implikasi penerapan akuntansi berbasis akrual pada entitas pemerintahan bukanlah perkara mudah. Mengingat banyaknya pro dan kontra dari kelebihan dan kekurangan basis akrual itu sendiri. Untuk itu diperlukan persiapan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh entitas pemerintahan dalam mengemban amanat dari undang-undang. Konsep basis akrual ini relevan dengan riset yang akan dilakukan lembaga pada entitas pemerintahan yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintahnya.

Implementasi akuntansi berbasis akrual merupakan suatu tatanan baru di bidang reformasi manajemen sektor publik dalam hal ini pada sektor pemerintahan. Hal ini tentu berpengaruh pada budaya dan struktur yang merupakan bentuk institusi. Budaya memiliki peran penting dalam sebuah organisasi dalam membatasi unsur yang diterima dalam proses mengadopsi unsur-unsur lingkungan institusional.

Penggunaan akuntansi berbasis akrual pada lembaga Pemerintah merupakan contoh dari kepatuhan terhadap amanat perundang-undangan yang berlaku bagi organisasi pemerintahan. Sebagai wujud institusi yang

telah menerapkan akuntansi berbasis akrual secara perdana maka kesuksesan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya Dinas Sosial menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga Pemerintah sangat tepat apabila dikaji dari teori Akuntansi.

3. Dasar Hukum Akuntansi Berbasis Akrual

Reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya paket UU di bidang Keuangan Negara pada tahun 2003 dan 2004 mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*good governance*) yang antara lain berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengikuti international best practices yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Reformasi keuangan negara mencakup reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini ditandai dengan kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan negara berupa laporan keuangan pemerintah yang setidaknya-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya. Saat ini pemerintah telah menyusun Laporan Keuangan dengan Basis Kas Menuju Akrual yang merupakan basis transisi sampai dengan akuntansi berbasis akrual sebagaimana ditetapkan dengan paket UU bidang keuangan Negara dapat diterapkan di Indonesia.

Dasar hukum penerapan akuntansi berbasis akrual adalah

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara:

Pasal 1:

Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

Pasal 70 ayat (2):

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

4. Kebijakan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut (PP Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran II.02). Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah

Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Kebijakan dalam pelaporan keuangan mengenai informasi dalam laporan keuangan tersebut sangat relevan dengan topik penelitian. Informasi yang digunakan dalam laporan keuangan mencakup informasi keuangan dan informasi non keuangan yang berguna untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. Uraian kebijakan akuntansi di atas sejalan dengan aspek transparansi dalam pelaporan keuangan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, dasar penyajian laporan keuangan tertuang dalam asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, terdiri dari:

- 1) Asumsi kemandirian entitas;
- 2) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- 3) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Dengan memenuhi ketiga asumsi dasar akuntansi ini entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya hal ini merupakan kaitan dengan aspek akuntabilitas.

Laporan keuangan mempunyai informasi yang berbeda-beda bagi pengguna laporan keuangan, seperti anggota legislatif, kreditur, karyawan dan publik. Selain itu pengguna laporan keuangan lainnya adalah pemasok, organisasi perdagangan, analisis keuangan, calon investor, penjamin, ahli statistik, ahli ekonomi dan pihak yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Kewenangan entitas pemerintahan menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh akan membentuk kedisiplinan antar unit organisasi. Penyajian pelaporan keuangan yang ditujukan untuk berbagai pihak yang berkepentingan tidak akan membuat kekacauan dalam pengambilan keputusan.

5. Kebijakan Akuntansi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi adalah pertimbangan dan atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen (PP Nomor 71 Tahun 2010) :

- a) Pertimbangan sehat. Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan.
- b) Substansi mengungguli bentuk formal. Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakikat transaksi dan realitas kejadian.
- c) Materialitas. Laporan keuangan harus mengungkapkan

semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi harus menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan mengidentifikasi metode-metode kebijakan akuntansi yang digunakan. Metode-metode tersebut dapat mempengaruhi penyajian laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting dalam memilih prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai.

Dalam riset ini, kebijakan akuntansi sangat relevan dengan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam suatu laporan keuangan maka membantu pembaca laporan untuk memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan. Pembaca laporan keuangan akan membentuk suatu kerangka dalam menganalisis informasi yang ada. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

B. Deskripsi Fokus Penelitian

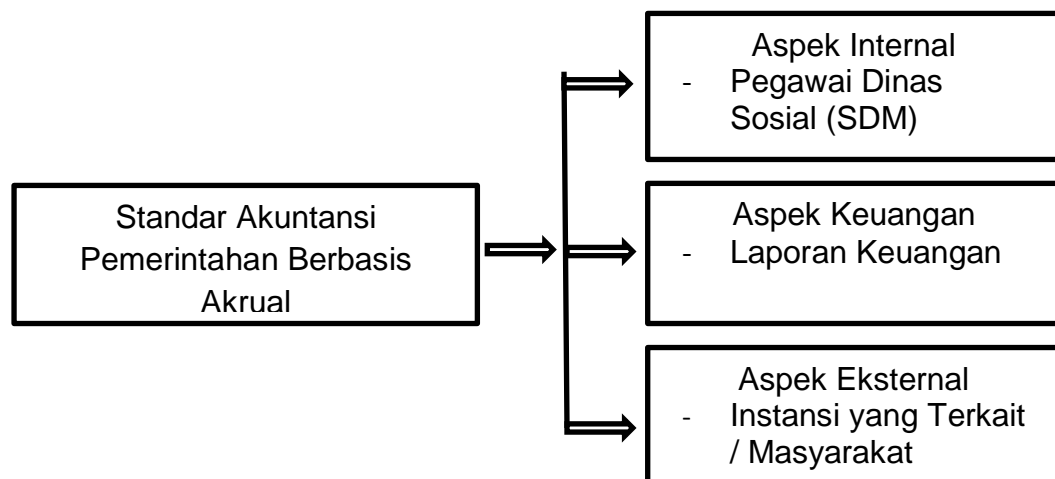
Penelitian mengenai implementasi akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan kebanyakan dilakukan dalam paradigma positivisme dengan analisis statistik. Penelitian tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui penerapan basis akrual dengan menggunakan kualitatif interpretif

belum banyak dilakukan di Indonesia. Kebanyakan penelitian implementasi basis akrual pada sektor pemerintah masih dalam kesiapan dan pengaplikasian pendekatan baru ini. Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan berhubungan dengan implementasi basis akrual.

C. Kerangka Konsep

Pemahaman mengenai bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan berbasis akrual dalam pelaporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dikaji berdasarkan teori institusional diperlukan suatu kerangka teoritis. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka kerangka teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut (lihat gambar 1):

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dilihat dari aspek internal di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ?
2. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ditinjau dari aspek Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ?
3. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dilihat dari aspek eksternal ?

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penggunaan metode kuantitatif dirasa kurang tepat dalam penelitian ini, karena penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan makna atas esensi yang terjadi di objek penelitian. Metode kuantitatif tidak dapat mengungkapkan makna atau esensi tersebut melalui angka-angka akuntansi yang dianggap sebagai indikator variabel penelitian.

Melalui metode kualitatif peneliti percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelahaan terhadap orang-orang dalam interaksinya dengan situasi sosial mereka

Menurut Danim (2002:12). Penelitian kualitatif bertujuan :

Untuk Memberikan makna atas fenomena secara holistik dan harus memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi, sehingga temuan-temuan dalam studi kualitatif dipengaruhi oleh nilai dan persepsi peneliti. Jadi makna atau esensi sebuah fenomena dapat interpretasikan melalui data yang diperoleh oleh peneliti melalui serangkaian wawancara dengan informan di objek penelitian.

B. Desain Penelitian

Pemilihan desain penelitian dalam penelitian ini dimulai dengan menempatkan bidang penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Langkah berikutnya, memilih paradigma teoritis penelitian yaitu berupa paradigma interpretif yang memberikan pedoman terhadap pemilihan metodologi penelitian. Tahapan terakhir dalam desain penelitian

adalah pemilihan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Penetapan lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terletak di Propinsi Sulawesi Utara. Kota Manado dalam hal ini yang dijadikan sebagai setting penelitian adalah Dinas Sosial yang melakukan penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Pemilihan setting ini juga menarik untuk diteliti karena pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah telah menerapkan akuntansi berbasis akrua.

Peneliti memilih instansi pemerintah daerah yang tepat. Peneliti berusaha mengungkap dinamika Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Peneliti memilih Dinas Sosial karena banyak anggaran yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang tentunya membutuhkan transparansi dan akuntabilitas suatu anggaran agar anggaran yang diperuntukan buat masyarakat dapat diketahui kebenaran dan ketepatan anggaran tersebut, oleh karena itu saat penerapan akuntansi berbasis akrua dalam penyusunan pelaporan keuangan SKPD tersebut dapat dijadikan SKPD induk dalam melakukan konsolidasi laporan keuangan yang dilakukan oleh DPKAD. Mengenai instansi pemerintah yang ditetapkan oleh peneliti disajikan sebagai berikut, (lihat tabel 3).

Tabel 4
Daftar SKPD Sebagai Objek Penelitian

No	SKPD	Keterangan
1	Dinas Sosial	Dinas bukan penghasil

Sumber: diolah peneliti

Setelah menetapkan SKPD yang terkait dengan lokasi penelitian dan sebelum memulai wawancara, peneliti meminta informan untuk terbuka, jujur dan tidak menutupi kegiatan sebenar-benarnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di lingkungan sektor publik, khususnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pelaporan keuangan, sehingga tidak ada unsur atau kepentingan apapun dalam proses pengumpulan data dan hasil penelitian ini. Peneliti berusaha memilih informan yang representatif dan kompeten dalam bidangnya sehingga hasil penelitian yang didapat dapat memberikan pemahaman mendetail dari praktik-praktik pelaksanaan basis akrua di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, aspek-aspek keberhasilan dalam menerapkan basis akrua dan interpretasinya dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan.

Dalam menetapkan informan ada tiga cara dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut (Bungin, 2011):

- a) Prosedur purposive merupakan strategi dengan menentukan informan sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian.
- b) Prosedur kuota adalah cara menetapkan informan dengan menentukan dari awal tentang jumlah orang dengan karakteristik yang diinginkan yang akan dijadikan informan.
- c) Prosedur bola salju merupakan metode penetapan sampel dengan cara hanya menetapkan informan kunci

diawal, selanjutnya informan-informan lain akan ditentukan kemudian.

Peneliti menggunakan prosedur purposive karena prosedur ini yang dinilai lebih tepat dengan penelitian kualitatif sesuai dengan topik masalah penelitian. Kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Ikut terlibat dalam menggunakan anggaran dan menanganinya di bidang administrasi keuangan.
- 2) Ikut dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pada SKPD.
- 3) Ikut dalam pengawasan dan review laporan keuangan SKPD.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data tersebut berupa hasil wawancara dengan informan. Informan penelitian ini diantaranya adalah Kepala Sub Bagian Keuangan, Verifikator, Staf Seksi Pelaporan, Bendahara Pengeluaran, dan Auditor pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) dan pihak yang terlibat secara langsung sehingga diharapkan peneliti

mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Sosial kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 2) Kasubag keuangan Dinas Sosial kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 3) Pegawai bagian verifikator Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 4) Bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 5) Pegawai bagian staf seksi pelaporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang mongondow Timur

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diteliti adalah data lisan dan tulisan. Untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan, voice recorder, dan kamera. Daftar pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan. *Voice recorder* digunakan untuk merekam yang dikemukakan oleh informan. Hasil rekaman kemudian ditranskripsikan melalui pencatatan. Kamera digunakan untuk mengambil gambar dokumen yang dibutuhkan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling fundamental dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2010:63) terdapat

beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, pada penelitian ini menggunakan interview (wawancara).

a) Teknik Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan dengan dua macam yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi secara mendalam melalui sumber yang mendalami situasi dan lebih mengetahui akan informasi yang sedang diperlukan oleh pewawancara. Wawancara ini dilakukan secara individual dan ditempat terpisah dengan durasi antara tiga puluh menit hingga satu jam. Wawancara tersebut akan direkam melalui voice recorder dan juga dicatat secara manual.

Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) dan pihak yang terlibat secara langsung sehingga diharapkan peneliti mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Sosial kabupaten Bolaang Mongondow Timur

- 2) Kasubag keuangan Dinas Sosial kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 3) Pegawai bagian verifikator Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 4) Bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 5) Pegawai bagian staf seksi pelaporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang mongondow Timur

Tabel 5
Daftar Informan Penelitian

No	Jabatan Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Kasubag Keuangan	1
3	Verifikator (Pembukuan)	1
4	Bendahara Pengeluaran	1
5	Staf Seksi Pelaporan	1
Jumlah		5

Sumber : diolah peneliti

b) Observasi

Penelitian juga dilakukan dengan teknik Observasi berupa pengamatan langsung terhadap objek penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran sebenarnya dari permasalahan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

c). Telaah dokumen

Teknik penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia pada lokus penelitian, khususnya menyangkut dokumen yang relevan dengan objek penelitian pada

Bidang Keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Adapun dokumentasi sebagai sumber data tambahan digunakan sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari responden, sehingga semakin memperkaya informasi tentang penerapan akuntansi berbasis akrual.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu proses mencari makna dari sekumpulan data sehingga dapat dituangkan dalam pembahasan temuan penelitian. Dengan kata lain, proses tersebut digunakan untuk memahami, menganalisis dan mengungkapkan fenomena dari suatu kejadian dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Metode analisis data pada penelitian kualitatif berbeda dengan metode yang digunakan pada pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, metode analisis data menggunakan alat uji statistik, sedangkan pada pendekatan kualitatif, metode analisis data merupakan proses yang kompleks dan melibatkan penalaran induktif dan deduktif, serta deskripsi dan interpretasi sehingga tidak dapat diuji secara statistik.

Selain itu tidak ada pedoman yang pasti untuk menganalisis data yang diperoleh melalui proses wawancara. Data yang diperoleh melalui wawancara hanya berupa kata-kata yang diucapkan oleh informan dan peneliti harus dapat memproses kata-kata tersebut menjadi sebuah informasi yang berguna untuk penelitiannya.

Metode analisis data pada penelitian kualitatif dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah data *reduction* dan kedua adalah data display.

a) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan (Basrowi dan Suwandi, 2008). Data yang diperoleh dari proses wawancara diseleksi dan diorganisir melalui coding dan tulisan ringkas. Dalam mereduksi data, data- data yang tidak relevan dipisahkan dari data yang relevan dengan penelitian.

b) Penyajian data (*data display*)

Miles dan Huberman (1992) menyarankan agar data ditampilkan dengan baik melalui tabel, charts, networks dan format gambar lainnya saat menarik kesimpulan. Hal ini berfungsi untuk memberi kemudahan dalam membaca dan menarik kesimpulan. Selain untuk memudahkan, format tabel, charts, networks dan format gambar lainnya juga dapat menarik perhatian pembaca. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian (naratif) mengenai esensi dari fenomena yang diteliti disertai dengan tabel.

c) Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah adanya temuan baru terkait penerapan system akuntansi keuangan

berbasis akrual dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

d) Penegecekan Validitas temuan

Kredibilitas sebuah penelitian sangat berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya dan diterima. Sugiyono (2010:121) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian

a) Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian ini terutama pada saat pengambilan data. Disisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, karakteristik masyarakat dan kondisi pemerintahan daerah sebagai objek penelitian.

Secara historis Kecamatan Kotabunan dan Kecamatan Modayag merupakan dua Kecamatan yang menjadi cikal bakal terbentuknya Daerah Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang kaya dengan beragam potensi Sumber Daya Alam. Seiring dengan tuntutan Reformasi dan atas dukungan seluruh komponen masyarakat, maka atas prakarsa Dra. Hj. Marlina Moha Siahaan selaku Bupati Bolaang Mongondow Waktu itu dan Wakil Bupati Drs. Sehan Mokoagow serta Presidium Pemekaran Bolaang Mongondow Raya, maka lahirlah dua daerah otonom baru yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

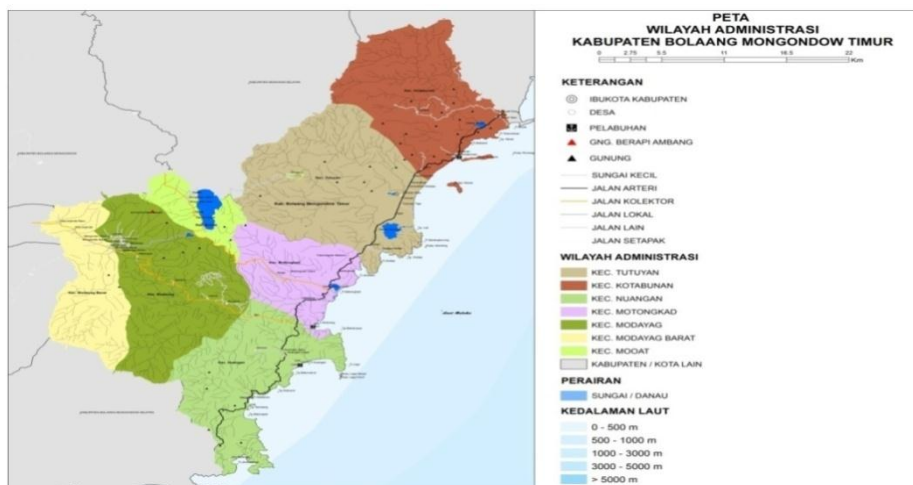
Tepat pada tanggal 21 Juli 2008 menjadi tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan

Ibu kotanya Tutuyan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow dan diresmikan pada tanggal 30 September 2008 sekaligus dengan pelantikan Pejabat Bupati Bapak Kandoli Mokodongan, SH yang bertugas mempersiapkan dan meletakkan dasar-dasar proses penyelenggaraan pemeliharaan serta pemilihan kepala daerah.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berdiri selama sembilan tahun dengan dua periode pemerintahan kepala daerah. Pada periode pertama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dipimpin oleh Bapak Bupati Sehan Lanjar, SH dan Wakil Bupati Medy Lensun. Pada periode kedua Bupati Sehan Lanjar, SH kembali memimpin Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Wakil Bupati Drs. Rusdi Gumalangit.

Gambar 2

PETA WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan Undang-Undang 29 Tahun 2008, kurang lebih 910,176 km² atau 5,95% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara, seluas 15,273,560 km². Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam hal ini ada tujuh kecamatan yakni:

- a. Kecamatan Nuangan
- b. Kecamatan Tutuyan
- c. Kecamatan Kotabunan
- d. Kecamatan Modayag
- e. Kecamatan Modayag Barat
- f. Kecamatan Motongkad
- g. Kecamatan Mooat

Tabel 6
Luas Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas km ²
1	Nuangan	141.859
2	Tutuyan	209.734
3	Kotabunan	159.152
4	Modayag	177.154
5	Modayag Barat	94.129
6	Motongkad	86.282
7	Mooat	41.866
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur		910.176

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Maret 2018

Secara umum, wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu daerah pantai dan pegunungan. Khususnya wilayah bagian timur terdapat empat kecamatan berbatasan langsung dengan pantai yakni Kecamatan Nuangan, Tutuyan, Kotabunan

dan Motongkad. Sedangkan tiga kecamatan lainnya terletak di daerah ketinggian. Apabila diukur di atas permukaan laut, posisi kecamatan Modayag terletak di daerah ketinggian antara 900m di atas permukaan laut (m dpl) dan untuk kecamatan Modayag Barat ketinggian 450 m dpl. Hal ini akibat tekstur alam yang ada bergunung-gunung dan berbukit-bukit.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten adalah sebagai berikut:

Visi:

Pemantapan Pemerintahan, Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan, Guna Menuju Bolaang Mongondow Timur yang Cerdas, Sehat, Kreatif, Berwawasan Lingkungan, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Pedesaan.

Misi:

- 1) Memantapkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pelayanan masyarakat yang berbasis *smart Government*;
- 2) Memantapkan kemandirian ekonomi masyarakat Bolaang Mongondow Timur yang berdaya saing;
- 3) Memantapkan relasi sosial masyarakat yang harmonis, dinamis dan maju;
- 4) Memantapkan kualitas lingkungan hidup sehat dan berkelanjutan;
- 5) Memantapkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- 6) Memantapkan sector pertanian dan perikanan yang unggul mandiri sejahtera;
- 7) Mamantapkan kearifan local sebagai kepribadian kebudayaan Bolaang Mongondow Timur.

b) Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur No 05 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan, perlu dilakukan upaya dalam menyiasati tuntutan perubahan structural maupun kultural, untuk itu Dinas Sosial dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, adalah :

1. Tugas

- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial.
- b. Melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial.
- c. Melaksanakan tugas Perbantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur.

2. Fungsi

- a. Melaksanakan pengelolaan data serta penyusunan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial
- b. Mengkordinasikan, membimbing dan membina, mengendalikan Pelaksanaan tugas dibidang Kesejahteraan Sosial.

- c. Melaksanakan usaha pelayanan, pemberian Bantuan Sosial kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- d. Melaksanakan pemberian dan bimbingan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan Sosial.
- e. Melaksanakan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor.
- f. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Bupati, serta memberikan usulan, saran baik diminta maupun tidak.

3. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

➤ Kepala Dinas Sosial

Melaksanakan tugas perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur , dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan data pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

➤ Sekretaris Dinas Sosial

Melaksanakan Tugas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pemebinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

➤ Subbagian Program dan Data

Sub bagian Program dan Data melaksanakan tugas program dan data.

- Subbagian Ketatausahaan
Subbagian ketatausahaan melaksanakan tugas Ketatausahaan.
- Subbagian Keuangan
Subbagian keuangan melaksanakan tugas keuangan.
- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
Melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan social
- Bidang Rehabilitasi Sosial
Melaksanakan tugas rehabilitasi social.
- Bidang Pemberdayaan Sosial
Melaksanakan tugas pemberdayaan social.
- Bidang Penanganan fakir miskin
Melaksanakan tugas penanganan fakir miskin.
- Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
Melaksanakan tugas perlindungan sosial korban bencana alam.
- Seksi Perlindungan Sosial Koban Bencana Sosial
Melaksanakan tugas perlindungan sosial korban bencana social.
- Seksi Jaminan Sosial Keluarga
Melaksanakan tugas jaminan sosial keluarga.
- Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia diluar panti dan lembaga
Melaksanakan tugas rehabilitasi Sosial anak dan Lanjut usia

diluar panti dan lembaga,

- Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Diluar Panti Dan Lembaga

Melaksanakan tugas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti dan lembaga.

- Seksi Rehabilitasi Tuna sosial dan Korban perdagangan orang

Melaksanakan tugas rehabilitasi sosial Tuna sosial dan Perdagangan Orang.

- Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan

Melaksanakan tugas Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan

- Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Kepahlawanan dan Restorasi Sosial antara lain pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

- Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Melaksanakan tugas Identifikasi dan Penguatan Kapasitas pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervise, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;

- Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

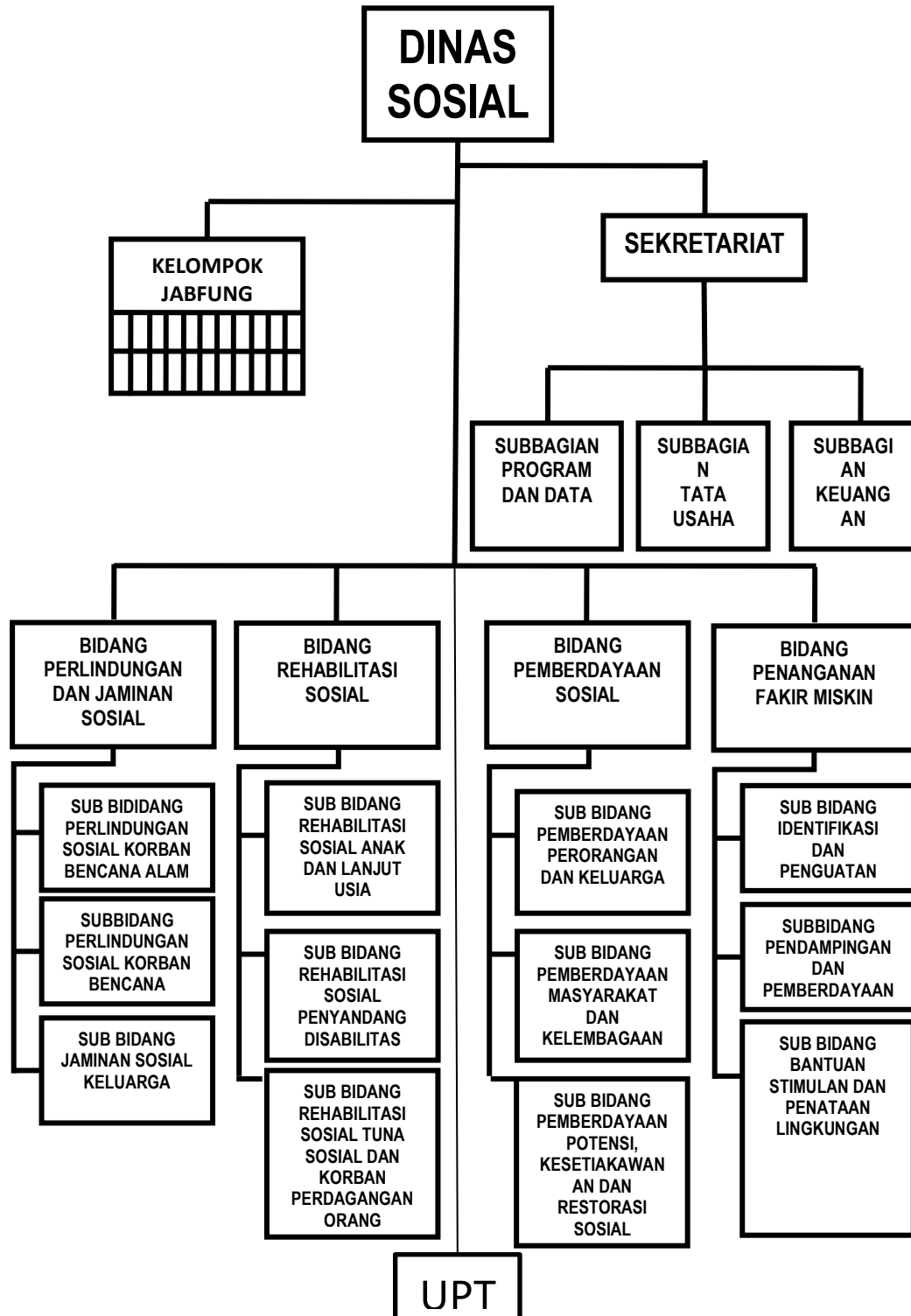
Melaksanakan tugas pendampingan dan pemberdayaan

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervise, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan; dan

➤ Seksi Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan

Melaksanakan tugas Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan antara lain pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervise, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulant.

Gambar 3
Struktur Organisasi Dinas Sosial
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

B. Karakteristik Sumber Data

1. Karakteristik Kepala Dinas Sosial.

Sumber data pertama dalam penelitian ini adalah Bapak Drs.Hi Rudy Suardi Malah yang lahir di Kotamobagu pada tanggal 07 Mei 1965. Sejak tahun 2017 sampai saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran.

2. Karakteristik Kepala Sub Bagian Keuangan Dinsos

Sumber data ke 2 dalam penelitian ini adalah Bapak Ayko Mentemas, SE,MM yang lahir di Manado pada tanggal 28 Juni 1978. Sejak tahun 2014 sampai saat ini beliau bekerja di Bagian Keuangan dan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan penatausahaan keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan.

3. Karakteristik Bendahara Pengeluaran

Sumber data ke 3 dalam penelitian ini adalah Ibu Nana Potabuga, yang lahir di Kotabunan pada tanggal 24 Desember 1995. Sejak tahun 2017 sampai saat ini beliau bekerja di Bidang Keuangan dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran yang menangani langsung tentang pengelolaan keuangan termasuk membuat laporan keadaan kas dan realisasi anggaran belanja sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Karakteristik Verifikasi Anggaran

Sumber data ke 4 Ibu Yuli Modeong, SE, yang kesehariannya bekerja

dibagian verifikasi dan perbendaharaan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan verifikasi dan pengelolaan perbendaharaan serta mempunyai fungsi mengadakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi anggaran.

5. Karakteristik Staf Seksi Pelaporan Keuangan

Sumber data ke 5 Ibu Diana Modeong sebagai Staf Seksi Pelaporan keuangan yang bertugas membantu bendahara membuat laporan keuangan.

Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur saat ini sebanyak 22 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Struktur dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai berikut :

Tabel 7
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Jabatan Struktural

NO	SKPD	ESELON			FUNGSIONAL	PELAKSANA STAF	JUMLAH
		II	III	IV			
01	Dinas Sosial	1	5	12		4	22

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tabel 8
Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan

NO	SKPD	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
01	Dinas Sosial	-	-	18	1	3		-	22

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

C. Hasil Analisis Data

1) Aspek Internal

Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Sumber daya (*resources*) diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya (*resources*) bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedangkan secara teknologis, sumber daya (*resources*) bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006: 158-159), sumber daya (*resources*) merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang

baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah terdiri dari:

a. Staf.

Staf Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

b. Informasi.

Informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang.

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi,

sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

d. Fasilitas.

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Penerapan SAP Berbasis Akrual mengharuskan pemerintah menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Untuk itu, pemerintah harus memiliki perencanaan SDM guna memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM, khususnya SDM pengelola keuangan, aset, dan Teknologi Informasi (TI). Selain itu, pemerintah juga harus mempunyai database SDM, melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan, sebagai dasar perencanaan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan optimalisasi SDM melalui pelatihan/sosialisasi penerapan SAP berbasis akrual untuk meningkatkan kompetensi SDM

yang ada, serta meminimalisasi risiko ketidak andalan penyajian laporan keuangan.

Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui program integrasi *training* dengan materi akuntansi akrual dan aplikasi pendukungnya secara intensif dengan dukungan Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga, program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah, serta kerja sama bilateral dan intemasional. Akan tetapi, berbagai program tersebut masih belum dapat memberikan pemahaman secara maksimal untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Pemda juga telah menganggarkan pelatihan dan pengembangan SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu Bapak Drs. Hi. Rudy Suardi Malah, terkait dengan pegawai bagian keuangan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, menyatakan bahwa:

"Pegawai yang ada saat ini menurut saya belum memadai, kita Masih membutuhkan tambahan pegawai karena tugas kita Semakin berat jadi pegawai juga harus tambah".

Sama halnya dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kasubag Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Bapak Ayko Mentemas,SE,MM juga menyatakan bahwa:

"Sebenarnya belum memadai, tapi untuk saat ini dalam hal pelaporan keuangan masih bisa teratasi dengan jumlah staf yang

ada, namun kedepan kita pasti membutuhkan tambahan staf mengingat staf yang ada saat ini sudah banyak yang golongan 3, kita pasti membutuhkan tambahan pegawai khusus di bidang akuntansi. Kalau sudah golongan 3 kemungkinan besar mereka akan keluar dari bidang akuntansi jika ada promosi jabatan. Jika ada penambahan pegawai kalau bisa yang berasal dari SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi penempatannya baik di SKPD, setidaknya mereka sudah mengerti masalah debit dan kredit, jurnal, neraca dan lain-lain, yang jelas mereka sudah punya dasar, masalah PPKnya (Pejabat Penatausahaan Keuangan) eselon IV tidak harus dari S1 Akuntansi, tapi kalau bisa stafnya harus ada yang dari SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi karena staf harus tau tentang teknis, ini semua untuk menunjang kelancaran laporan keuangan. Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ini SDM merupakan kendala utama".

Senada dengan pendapat di atas, Ibu Yuli Modeong. selaku Verifikasi Anggaran di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow , terkait dengan jumlah pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual menyatakan bahwa "Jumlahnya belum memadai, masih butuh tambahan, akrual ini kan hal yang baru jadi kita butuh pegawai yang betul-betul paham".

Selanjutnya menurut Ibu Nana Potabuga selaku Bendahara Pengeluaran, terkait dengan jumlah pegawai yang ada saat ini di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, ia menyatakan bahwa:

"Belum memadai lah, kita masih membutuhkan tambahan pegawai. Kita dulu sudah pernah mengusulkan tapi sampai sekarang belum ada penambahan, kalau ada penambahan kami berharap ya minimal SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi biar enak kalau sudah punya dasar akuntansi tidak setengah mati ngajarinnya sedikit banyak mereka sudah mengerti tentang dasar-dasar akuntansi, ini juga yang menjadi kendala di SKPD khususnya di Dinas Sosial. Di SKPD ini kan laporannya selalu ada masalah, salah satu penyebabnya ya ini SDMnya kurang, kita tidak menyalahkan

manusianya tapi memang pengetahuannya yang terbatas tentang akuntansi karena akrual ini kan memang baru diterapkan. Ya kalau bisa di Bidang Akuntansi ini terdiri dari orang-orang akuntansi seperti SMK Akuntansi dan D3 Akuntansi, kalau untuk SKPD dibagian keuangan sebaiknya harus ada orang akuntansi biar enak membuat laporannya".

Senada dengan Bendahara Pengeluaran Ibu Nana Potabuga, Diana Modeong juga mengatakan bahwa terkait dengan jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, menyatakan bahwa:

"Saya kira saat ini jumlah pegawai yang ada memang belum memadai, kita masih membutuhkan tambahan pegawai dan kalau bisa terutama dari SMK Akuntansi maupun dari D3 Akuntansi".

Berdasarkan hasil wawancara mengenai jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dapat disimpulkan bahwa saat ini jumlah pegawai masih belum memadai, akan tetapi untuk saat ini dalam hal pelaporan keuangan masih bisa teratasi dengan jumlah staf yang ada. Namun kedepan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur membutuhkan tambahan staf di bidang akuntansi bisa berasal dari SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi.

Terkait dengan kualitas pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyatakan bahwa:

"Kualitas pegawai yang ada sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar kedepan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mempunyai staf yang betul-betul mengerti tentang akuntansi bukan hanya sekedar bekerja dengan sistem tapi betul-betul mengerti alur akuntansinya".

Sama halnya dengan Kepala Dinas social Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kasubag Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Bapak Ayko Mentemas, SE,MM. juga menyatakan bahwa:

"Sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar kedepan Dinas Sosial mempunyai staf atau pegawai berkualitas, seperti yang telah saya jelaskan diatas secara kuantitas atau jumlah pegawai untuk saat ini masih mencukupi, namun secara kualitas masih kurang dan perlu di tingkatkan lagi. Pastiya melalui pelatihan-pelatihan atau mengikuti kegiatan sosialisasi masalah akuntansi berbasis akrual, baik sebagai pelaksana maupun sebagai peserta intinya kita mengikuti pelatihan dengan tujuan agar bisa mengerti proses penyusunan pelaporan keuangan dengan standar akuntansi berbasis akrual".

Senada dengan pendapat di atas, Ibu Yuli Modeong, selaku Verikasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menyatakan bahwa:

"Kalau kualitas sudah baik akan tapi masih perlu ditingkatkan lagi, ya harus banyak-banyak mengikuti pelatihan lah biar pengetahuan dan ilmunya juga bertambah".

Selanjutnya menurut Ibu Nana Potabuga. selaku Bendahara Pengeluaran, ia menyatakan bahwa:

"Kualitas pegawai sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan-pelatihan agar kedepan Dinas Sosial mempunyai staf atau pegawai yang paham mengenai SAP berbasis akrual ini".

Senada dengan Bendahara Pengeluaran, Staf Seksi Pelaporan Keuangan Ibu Diana Modeong juga menyatakan bahwa:

"Kualitas pegawai yang ada sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan agar semua memahami bagaimana SAP berbasis akrual itu".

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kualitas pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat disimpulkan bahwa saat ini kualitas pegawai yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan-pelatihan, agar kedepan Dinas Sosial mempunyai staf atau pegawai berkualitas.

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang aktivitas kerja. Terkait dengan sarana yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyatakan bahwa:

"Kalau sarana sudah memadai tinggal pegawai yang melaksanakannya masih ada yang belum mengerti betul cara mengoperasikannya, ini lah yang perlu ditingkatkan. Caranya dengan pelatihan, kita sudah pernah mengikuti pelatihan itu sendiri tentang akrual. Memang belum cukup, sebaiknya perlu pelatihan yang kontinue tetapi semua itu kan tergantung anggaran dan kebutuhan, kalau memang itu harus kita laksanakan kenapa tidak apalagi untuk kebutuhan daerah asal dananya ada".

Menurut Bapak Ayko Mentemas, SE,MM. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menyatakan bahwa "Kalau sarana sudah memadai, yang biasa mengalami gangguan aplikasinya sama SDM yang mengelola aplikasi".

Selanjutnya menurut Ibu Yuli Modeong, selaku Verifikasi Anggaran Dinas Sosial, ia menyatakan bahwa "Sarana sudah memadai tetapi masih perlu penyempurnaan terkait dengan informasi teknologi keuangan daerah".

Senada dengan Bagian Verifikasi Anggaran, Bendahara Pengeluaran Ibu Nana Potabuga juga menyatakan bahwa:

"Sarananya sudah bagus, tinggal manusianya aja yang masih perlu dilatih dan di tambah pemahamannya tentang akuntansi akrual. Yang jadi kendala kalau sistemnya bermasalah".

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sarana yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat disimpulkan bahwa saat ini sarana yang ada sudah memadai. Namun memang SDM yang menggunakan sarana tersebut perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan.

Gambar 4
Situasi Bimtek Standar Akuntansi Berbasis Akrual di
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur



Terkait dengan pemberian wewenang di setiap Unit Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur semua informan mengatakan bahwa semua pemberian wewenang sudah sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi masing-masing dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan.

Terkait dengan perlunya kompensasi untuk pegawai agar mereka bersemangat dalam membuat laporan keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur semua informan mengatakan bahwa pegawai pembuat laporan keuangan perlu diberikan kompensasi agar mereka termotivasi dan lebih semangat dalam bekerja.

2. Aspek Keuangan

Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tersebut masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual

menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah dikeluarkan.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menganut basis akrual secara penuh, yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut akan dimulai pada tahun 2015.

Ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum, dan hal ini berarti juga bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual.

Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan demikian pada saat ini merupakan masa persiapan dan

peralihan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perubahan penggunaan basis akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu basis kas dan basis akrual.

Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Secara lebih mendalam, Study 14 IF AC *Public Sector Committee* (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Dengan adanya pelaporan keuangan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan

kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual Juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Adapun tujuan penggunaan basis akrual yaitu:

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan)
- b) Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen asset
- c) Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah
- d) Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan
- e) Mereformasi sistem anggaran belanja
- f) Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari tujuan diatas penulis melihat adanya pencapaian tujuan

berbasis akrual yang telah dicapai oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, salah satunya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak selalu ketergantungan terhadap pemerintah pusat karena dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual maka pemerintah kabupaten bolaang mongondow timur bisa lebih mengontrol pendapatannya serta menyusun anggaran sesuai dengan pendapatan daerah, bisa mengontrol pendapatan aset sesuai yang diharapkan masyarakat, sebelumnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih sedikit tergantung kepada APBN karena control terhadap pendapatan daerah masih kurang.

Manfaat yang diperoleh dari penerapan basis akrual adalah:

- a) Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
- b) Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah
- c) Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya
- d) Standar yang dapat diterima umum
- e) Memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah
- f) Sesuai Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional.

Alasan penggunaan basis akrual yaitu:

- a) Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup misal transaksi non kas untuk pengambilan keputusan

ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan

- b) Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat
- c) untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (*full costs of operation*)
- d) Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi asset dan kewajiban.
- e) Akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual merupakan pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun mengingat kesiapan berbagai perangkat yang ada pada unit kerja diseluruh tingkatan pemerintahan, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yaitu dengan penerapan SAP berbasis Kas Menuju Akrual berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan selanjutnya akan dilaksanakan SAP berbasis Akrual secara penuh sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 mulai tahun 2015.

Apabila diperbandingkan antara SAP Kas menuju Akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005) dengan SAP Akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010) terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling memerlukan perhatian adalah pada jenis/komponen laporan keuangan, khususnya mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban

yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga merupakan entitas pemerintah yang harus melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Sebagai entitas pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Untuk itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga harus melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada stakeholder berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Suatu kebijakan tidak akan pernah memberikan makna apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Karena implementasi merupakan proses nyata dari sebuah kebijakan. Demikian juga halnya dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah bersifat mengikat dan memiliki kewajiban, larangan, dan hukuman dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Peneliti menanyakan tentang Peranan laporan keuangan untuk Dinas Sosial kepada Bapak Ayko Mentemas, beliau mengatakan bahwa :

“Peranan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan, selain itu juga laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang2an”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu Bapak Drs. Hi. Rudy Suardi Malah, terkait dengan peran dan tanggungjawabnya dalam proses penyusunan pertanggung jawaban laporan keuangan menyatakan bahwa:

"Peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban pelaporan keuangan adalah memberikan arahan dan masukan serta selalu memonitor proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), untuk akrual ini saya percayakan kepada bidang akuntansi karena mereka lebih paham dari saya karena mereka pelaksana teknisnya".

Sementara menurut Bapak Ayko Mentemas, SE,MM. selaku Kasubag Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, terkait dengan peran dan tanggungjawabnya dalam proses penyusunan pertanggungj awaban laporan keuangan menyatakan bahwa:

"Kalau peran saya selaku Kepala sub bagian Keuangan terlibat langsung dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan dimana fungsinya selaku Kasubag Keuangan Di Dinas Sosial ini".

Selanjutnya menurut Ibu Yuli Modeong, SE. selaku Verifikasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, terkait dengan peran dan tanggungjawabnya dalam proses penyusunan pertanggungjawaban

laporan keuangan menyatakan bahwa:

"Peran saya bersama staf menghimpun dan mencatat semua transaksi, memverifikasi laporan, membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang ada di Dinas Sosial kemudian mengolahnya ke dalam bentuk laporan keuangan semester mulai dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)".

Menurut Bapak Ayko Mentemas, selaku Kasubag Keuangan, terkait dengan peran dan tanggungjawabnya dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan menyatakan bahwa:

"Peran pimpinan dalam hal ini saya selaku Kasubag Keuangan berusaha mengkomunikasikan dan bertanggungjawab terkait penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang akan disajikan, memberikan informasi pada seluruh PPK SKPD agar menertibkan laporan bulanan. Dalam membuat laporan keuangan biasanya ada aja yang kurang, sebenarnya sih kalau komunikasi biasa lancar aja tapi ini masalah laporan keuangan orang yang mengerjakan laporan itu yang kadang kurang mengerti jadi kami maklum aja, tapi tetap kami arahkan agar laporan mereka bisa benar dan tepat waktu, apalagi pekerjaan kami bekerja dibantu dengan sistem. Antara sistem dan manual kami rekonsiliasikan dulu setelah cocok dengan data yang ada dari SKPD baru kami sajikan berupa laporan keuangan daerah. Aktual ini kan hal yang baru jadi memang agak bingung dan sedikit kerja keras apa lagi dasar mereka kan bukan dari akuntansi, intinya ini masalah SDM masih perlu dibina lagi agar kedepan bisa lebih paham".

Sedangkan menurut ibu Nana Potabuga selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, terkait dengan peran dan tanggungjawabnya dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan menyatakan bahwa:

"Bendahara pengeluaran bertanggungjawab membuat laporan SPJ bulanan yang mencatat semua transaksi pengeluaran dari Masing-masing kegiatan termasuk GU (Ganti Uang), BKU (Buku Kas Umum), pembuatan SPP (Surat Persediaan Pembayaran) yang ada di SKPD kemudian disahkan oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Kasubag Keuangan PPK SKPD".

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa setiap struktur yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan mempunyai peran dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka dalam SKPD yang semuanya saling berkaitan antara satu struktur dengan struktur yang lain dalam organisasi.

Terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu Bapak Drs. Hi. Rudy Suardi Malah, menyatakan bahwa:

"Ada sedikit kendala yang dihadapi dalam hal komunikasi disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang akrua, karena ini kebijakan yang baru diterapkan pasti lah ada kendala terutama dari SDMnya meskipun sudah difasilitasi dengan sistem".

Berbeda halnya dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kasubag Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Bapak Ayko Mentemas, SE,MM. menyatakan bahwa:

"Tidak ada kendala dalam hal komunikasi antara kepala bidang dengan kepala seksi dan staf di bidang keuangan dalam pelaksanaan SAP berbasis akrua, kecuali sistem yang bermasalah. Komunikasi antara kepala bidang dengan kepala dinas dalam pelaksanaan juga tidak ada kendala atau hambatan karena dalam hal ini kepala dinas sangat mendukung pelaksanaan akrua, karena akrua ini kan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karena sibuk ada agenda yang tertunda, mungkin secara teknis beliau kurang memahami bagaimana proses pencatatan akuntansi secara akrua baik dengan sistem maupun dengan manual tetapi secara umum beliau mengerti tentang akrua".

Selanjutnya menurut Ibu Yuli Modeong, selaku Staf Verifikasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua, menyatakan bahwa:

"Hambatan yang ditemui dalam hal komunikasi adalah kurangnya pengetahuan pegawai tentang SAP berbasis akrua karena ini merupakan hal baru, tapi hambatan itu bisa di minimalisir karena dekat dari induknya kalau ada hal yang kurang dipahami tentang akrua langsung ditanyakan pada bidang akuntansi selaku sentral pelaporan keuangan, apalagi staf yang ada di PPK memang dari D3 akuntansi sedikit banyak sudah tau tentang akuntansi, yang agak bingung mungkin dari SKPD lain. Menurut saya sebaiknya pengelola laporan keuangan harus punya dasar pengetahuan akuntansi yang cukup agar komunikasi bisa lancar antara atasan dan staf. Sebaiknya harus banyak mengikuti pelatihan tentang SAP berbasis akrua biar paham, dan biar komunikasi jadi lancar".

Menurut Bapak Diana Modeong, selaku Staf Seksi Pelaporan Keuangan, terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua, menyatakan bahwa:

"Kalau komunikasi dengan staf di Bidang Keuangan tidak ada masalah karena sudah pada ngerti. Rata-rata mereka sudah ikut pelatihan SAP berbasis akrua terutama yang pernah ikut pelatihan di Semarang, cuma ya tidak semua sama ilmunya ada yang banyak, sedang ada yang dikit-dikit, tapi secara umum. tentang akrua semua ngerti, apalagi kami dibidang akuntansi sebagai kiblatnya pelaporan ya mau nda mau kami harus lebih dulu ngertinya dari pada teman-teman di SKPD, tapi kembali lagi ini masalah SDMnya jadi sabar-sabarlah".

Sedangkan menurut Nana Potabuga selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi

antara pimpinan dan staf dalam proses pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akruwal, menyatakan bahwa:

"Kalau dari pihak bendahara tidak ada kendala karena kami bekerja dengan sistem semua sudah tersedia di sistem, yang paling berhubungan dengan akuntansi akruwal bagian PPK karena mereka yang menyajikan laporan keuangan mulai LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Yang menjadi kendala bagi kami jika sistem mengalami gangguan dan jika tagihan yang diusulkan tidak tersedia SPDnya. Kalau tidak dibantu dengan sistem ya bingung juga, mau diapain laporannya karena karni kurang mengerti akuntansi, karena bekerja dibantu dengan sistem kami jadi terbantu".

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akruwal dapat disimpulkan bahwa setiap struktur yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akruwal mempunyai sedikit kendala dalam hal komunikasi yang disebabkan karena pengetahuan mengenai SAP berbasis akruwal diantara setiap pegawai berbeda-beda sehingga diperlukan adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia meskipun sudah difasilitasi dengan sistem.

Para pegawai di Bagian Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dituntut untuk memahami apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal. Rata-rata dari mereka memang telah memahami apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu Bapak Drs. Hi. Rudy Suardi Malah, yang menyatakan bahwa "Rata-rata mereka

sudah paham mengenai SAP Berbasis AkruaI karena memang bidangnya mereka disitu".

Sama halnya dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kasubag Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Bapak Ayko Mentemas, SE, MM. juga menyatakan bahwa:

"Sudah paham tapi belum sepenuhnya karena rata-rata pegawai di Bidang Akuntansi mulai dari kepala seksi sampai staf sudah mengikuti pelatihan beberapa hari (sekitar tiga minggu) di Semarang dan pelatihan-pelatihan yang lain tentang akuntansi akruaI, karena Semarang menjadi pusat pelatihan akuntansi berbasis akruaI bagi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Jika saya gambarkan dengan angka ada yang pemahamannya sudah 70%, ada yang 60%, ada yang 50%. Pemahaman mereka bervariasi karena mereka mempunyai tugas masing-masing, namun secara umum semua sudah faham tentang akuntansi berbasis akruaI".

Selanjutnya Ibu Yuli Modeong, SE. selaku Bagian Verifikasi anggaran Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, terkait dengan pemahaman para pegawai di Bidang Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI menyatakan bahwa :

"Belum sepenuhnya memahami, paling yang paham tentang akruaI bagian tertentu yang ada hubungannya dengan laporan keuangan, itupun tingkat pemahamannya tidak semua sama, karena masing-masing punya tugas sendiri-sendiri jadi yang diurusi tugasnya aja".

Selanjutnya Ibu Diana Modeong, selaku Staf Seksi Pelaporan Keuangan, terkait dengan pemahaman para pegawai di Bidang Akuntansi Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI menyatakan bahwa:

"Kalau di Bidang Keuangan Insya Allah sudah paham semua tentang akrual, walaupun berbeda tingkat pemahamannya, karena mereka kan punya tugas masing-masing".

Senada dengan Staf Seksi Pelaporan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Ibu Nana Potabuga terkait dengan pemahaman para pegawai di Bidang Akuntansi Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual menyatakan bahwa:

"Kalau Bidang Akuntansi rata-rata dari mereka sudah memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual, karena memang tugasnya mengurus laporan keuangan".

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman para pegawai di Bidang Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dapat disimpulkan bahwa para pegawai di Bagian Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dituntut untuk memahami apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Rata-rata dari mereka telah memahami apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual mulai dari kepala seksi sampai staf sudah mengikuti pelatihan di Semarang dan pelatihan-pelatihan yang lain tentang akuntansi akrual, akan tetapi tingkat pemahaman mereka bervariasi karena mereka mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Praktek pelaporan keuangan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sekarang ini telah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sejak tahun 2016. Adapun bahan

yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku SKPD yaitu mengandalkan laporan keuangan entitas akuntansi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Terkait dengan mekanisme sistem akuntansi keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyatakan bahwa:

"Mekanismenya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017, semua sudah sesuai dengan aturan yang ada".

Sama halnya dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kepala Subbag Keuangan Dinas Sosial Bapak Ayko Mentemas, SE, MM. menyatakan bahwa:

"Mekanisme sistem akuntansi keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, semua sudah diatur didalamnya, baik dari tahap awal sampai tahap akhir laporan keuangan. Di tingkat SKPD dari transaksi yang ada kemudian di jurnal dari jurnal diposting ke buku besar, dari buku besar apakah transaksi ini mengarah ke LRA apakah ke Neraca. Karena kita ini bekerja dengan sistem jadi agak mudah karena semua sudah terformat didalam sistem. Maka dari itu biasanya teman-teman yang bekerja sebagai operator sistem semua bisa, tetapi alurnya secara pencatatan akuntansi belum tentu bisa".

Senada dengan Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran Ibu Nana Potabuga juga menyatakan bahwa:

"Merujuk pada Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dasarnya dari Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013".

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual.

Tabel 9
Peyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur Tahun 2017 Berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 71 Tahun 2010

No	Unsur	PP 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Dinas Sosial	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
Neraca						
1	Penyajian posisi keuangan dalam aset, kewajiban, dan ekuitas dana.	PSAP 03 paragraf 44 Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.	Laporan Neraca menyajikan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu	✓		
2	Penyajian Klasifikasi aset dan kewajiban	PSAP 03 paragraf 44 Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.	Dinas Sosial mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca	✓		
3	Penyajian Pos-pos dalam Neraca.	PSAP 03 paragraf 49 Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; ekuitas.	Neraca mencantumkan sekurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; aset lainnya kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; ekuitas.	✓		

Tabel berlanjut

No	Unsur	PP 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Dinas Sosial	Sama	Berbeda	Tidak Relevan
Laporan Ekuitas						
1	Penyajian Pos-pos dalam laporan perubahan ekuitas	<p>PSAP Paragraf 101-102 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:</p> <p>a. Ekuitas awal b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:</p> <p>1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 3. Ekuitas akhir.</p> <p>Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p>	<p>Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:</p> <p>a. Ekuitas awal b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:</p> <p>1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d. Ekuitas akhir.</p> <p>Dan Dinas Sosial telah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan</p>	✓		

Sumber : Bagian keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme system laporan keuangan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

4. Aspek Eksternal.

Pada awal tahun 2000-an, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR menerbitkan 3 undang-undang di bidang keuangan negara yang memiliki peranan besar dalam mendorong implementasi akuntansi akrual sektor pemerintahan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang ini lahir sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.

Instansi Terkait dan Masyarakat

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat

mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya.

Aspek eksternal dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ini menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah :

“Laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna karena informasi dalam laporan keuangan bertujuan umum guna memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna antara lain Masyarakat, Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, pemerintah itu sendiri”

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama diantara banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi suatu kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme system akuntansi keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Basis akrual melakukan pencatatan berdasarkan apa yang seharusnya menjadi pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode. Dengan demikian, suatu perusahaan akan mencatat pendapatannya berdasarkan seluruh pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan, terlepas apakah hal ini telah diwujudkan dalam bentuk penerimaan kas atau tidak, demikian juga dengan beban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan semua menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual petunjuk pelaksanaan/prosedur operasi kerja sudah dapat dimengerti dengan baik oleh para pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Tidak ada petunjuk pelaksanaan khusus secara tertulis, akan tetapi semua berjalan secara simultan atau perintah langsung secara lisan yang penting pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 56 Tahun 2017.

BAB V

PEMBAHASAN

Fungsi akuntansi pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh IF AC Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual Juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Penerapan SAP berbasis akrual memerlukan upaya keras pemerintah karena jumlah jenis laporan yang bertambah banyak. Dengan adanya standar baru ini, laporan keuangan yang harus disiapkan pemerintah bertambah menjadi tujuh jenis dari basis sebelumnya yang hanya empat jenis. Ketujuh jenis laporan itu meliputi :

- 1) Neraca,
- 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- 3) Laporan Operasional (LO),
- 4) Laporan Arus Kas (LAK),
- 5) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih,
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi berbasis akrual merupakan *international best practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management* (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Basis akrual mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu:

- 1) Pengakuan pendapatan: Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum

diterima.

- 2) Pengakuan beban: Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun beban tersebut belum dibayar.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah model implementasi kebijakan yang mengedepankan tiga aspek implementasi yaitu: Aspek Interen Sumber Daya Manusia (resources), Aspek Laporan Keuangan dan, Aspek Eksteren (Instansi Terkait).

1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilihat dari aspek interen.

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (resources). Sumber daya (resources) diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumberdaya (resources) bertalian langsung dengan biaya atau pengorbanan langsung

yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedangkan secara teknologis, sumber daya (resources) bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Sumber daya (resources) Merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan. Isi dan tujuan-tujuan kebijakan mungkin dapat dikomunikasikan tetapi jika para pelaksana (implementator) kurang sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan isi kebijakan maka implementasinya cenderung tidak berjalan efektif. Sumber daya tersebut meliputi: staf, anggaran, fasilitas-fasilitas dan wewenang (Edward dalam Winarno (2002:126).

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, aparatur pengelola keuangan harus memiliki pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang baik, didukung dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, pelatihan yang optimal, dan pengalaman kerja yang cukup di bidang keuangan.

Penerapan SAP Berbasis Akrual mengharuskan pemerintah menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Untuk itu, pemerintah harus memiliki perencanaan SDM guna memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM, khususnya SDM pengelola keuangan, aset, dan teknologi informasi (TI). Selain itu, pemerintah juga harus mempunyai database SDM, melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan, sebagai dasar perencanaan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM tersebut. Pemerintah

juga perlu melakukan optimalisasi SDM melalui pelatihan/sosialisasi penerapan SAP berbasis akrual untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada, serta meminimalisasi risiko ketidak andalan penyajian laporan keuangan.

Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui program integrasi training dengan materi akuntansi akrual dan aplikasi pendukungnya secara intensif dengan dukungan Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga, program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah, Akan tetapi, berbagai program tersebut masih belum dapat memberikan pemahaman secara maksimal untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Pemda juga telah menganggarkan pelatihan dan pengembangan SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah namun sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial sudah cukup membantu dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Seperti kita ketahui bahwa Sumber Daya Manusia memiliki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP

berbasis akrual. Hal ini menunjukkan pelatihan yang memadai memiliki efek positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi. Dengan adanya pelatihan akuntansi berbasis kas menuju basis akrual, dapat memberikan pemahaman penerapan SAP berbasis akrual dan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas., bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual diketahui bahwa saat ini jumlah pegawai masih belum memadai, akan tapi untuk saat ini dalam hal pelaporan keuangan masih bisa teratasi dengan jumlah staf yang ada, karena pegawai bagian keuangan Dinas Sosial khususnya bagian keuangan selain mempunyai pengalaman membuat laporan keuangan mereka juga selalu mengikuti pelatihan ataupun bimtek tentang penerapan akuntansi berbasis akrual dengan demikian factor pendidikan yang mengharuskan lulusan akuntansi tidak membuat pegawai keuangan Dinas Sosial patah semangat untuk memberikan hasil laporan keuangan yang baik. Namun demikian untuk kedepan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tetap membutuhkan tambahan staf di bidang keuangan bisa berasal dari SMK Akuntansi atau D3 Akuntansi.

Kualitas pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang ada saat ini sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan-pelatihan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai

peserta agar kedepan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mempunyai staf atau pegawai berkualitas.

Keberhasilan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual akan berjalan sebagaimana mestinya, jika didukung dengan pemahaman pegawai keuangan tentang SAP yang memadai. Pegawai keuangan yang memiliki pemahaman SAP mampu mengerti dan menerapkannya dalam setiap aspek bidang pekerjaan yang terkait. Pemahaman merupakan tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Orang yang memiliki pemahaman tidak sekedar hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang dinyatakan, makna operasionalnya, dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.

Pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pemahaman SAP berbasis akrual aparatur pengelola keuangan pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, artinya semakin banyak pelatihan yang diikuti oleh aparatur maka akan semakin tinggi tingkat pemahamannya terhadap SAP berbasis akrual;

Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pemahaman SAP berbasis akrual aparatur pengelola keuangan pada pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ini berarti bahwa semakin lama seorang aparatur ditempatkan pada bagian keuangan

sehingga ia memiliki pengalaman kerja yang memadai, maka akan semakin tinggi tingkat pemahamannya terhadap SAP berbasis akrual;

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang aktivitas kerja. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa saat ini sarana yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menunjang pelaporan akuntansi berbasis akrual sudah memadai. Namun memang SDM yang menggunakan sarana tersebut perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan.

Terkait dengan pemberian wewenang di setiap Unit Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur semua informan mengatakan bahwa semua pemberian wewenang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari setiap pelaksana penyusunan laporan keuangan.

Kompensasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai. Oleh karena ini dalam membuat laporan keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu diberikan kompensasi yang adil agar para pegawai termotivasi dan lebih semangat dalam bekerja sehingga kinerja dapat meningkat akan tetapi harus disesuaikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilihat Aspek Laporan Keuangan.

Pimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala aktivitas organisasi termasuk penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap struktur yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan mempunyai peran dan Tanggung Jawab masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka dalam SKPD yang semuanya saling berkaitan antara satu struktur dengan struktur yang lain dalam organisasi.

Setiap entitas pelaporan keuangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana

pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antar generasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Selain itu kinerja pemerintah daerah yang baik dewasa ini menjadi tuntutan rakyat sebagai perwujudan konsep otonomi daerah, yang ditunjukkan dengan kemampuannya dalam mengelola keuangan pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Kemampuan pengelolaan keuangan digunakannya rasio keuangan sebagai alat evaluasi disebabkan sistem akuntansi yang mungkin berbeda dan indikator keuangan dianggap yang paling sesuai untuk evaluasi dan perbandingan kinerja instansi. Pengukuran kinerja dapat dianggap sebagai salah satu alat utama yang membantu untuk menilai situasi sekarang dan untuk membuat keputusan,

yang membantu untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem pengukuran kinerja memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk memberikan informasi yang akan meningkatkan kinerja organisasi di sektor publik dan untuk menjelaskan dana yang digunakan. Indikator dan ukuran kinerja dikembangkan untuk digunakan dalam konteks yang spesifik. Beberapa indikator kinerja dikembangkan dari sejumlah indikator risiko yang dikembangkan untuk memandu instansi dalam mengambil keputusan.

3). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dilihat Aspek Eksteren.

Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual maka aspek eksteren dilihat dari Akuntabilitas eksternal organisasi melekat pada lembaga negara sebagai suatu organisasi pada sektor publik untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan hasil dari pelaksanaan amanat tersebut dapat dikomunikasikan kepada pihak eksternal organisasi tersebut yaitu kepada masyarakat luas.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga non publik dan media massa sebagai sarana untuk meningkatkan arus informasi. Untuk mencapai suatu tujuan, maka pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi kesuksesan pencapaian transparansi dan akuntabilitas suatu entitas adalah lingkungan eksternal yang merupakan factor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah keefektifan transparansi dan pertanggungjawaban entitas atas wewenang dan tanggung jawab yang di limpahkan kepadanya.

Akuntabilitas eksternal organisasi melekat pada lembaga negara sebagai suatu organisasi pada sektor publik untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan hasil dari pelaksanaan amanat tersebut dapat dikomunikasikan kepada pihak eksternal organisasi tersebut yaitu kepada masyarakat luas.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Perangkat pendukung transparansi digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan dari aspek tranparansi yang berkaitan

dengan kepentingan dalam pelaporan keuangan yaitu untuk menciptakan kepercayaan dan hubungan timbal balik antara sektor publik yaitu Pemerintah selaku entitas pemerintahan dengan masyarakat.

Implementasi transparansi ditujukan untuk membangun keyakinan publik kepada instansi-instansi pemerintah (sektor publik) adalah satuan kerja perangkat daerah yang bersih dan professional dalam melakukan tugasnya.

Dengan adanya transparansi yang ditingkatkan di lingkungan sektor pemerintahan maka akan mendorong publik untuk memahami situasi pada instansi publik atau pemerintah dengan demikian publik akan berpartisipasi aktif atas pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh instansi tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang baik. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yang dilihat dari 3 aspek yaitu aspek interen, aspek laporan keuangan dan aspek interen yaitu :

1. Aspek Interen

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Latar belakang pendidikan tidak terlalu berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pemahaman SAP berbasis akrual aparatur pengelola keuangan pada pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya untuk Dinas Sosial, artinya aparatur dengan latar belakang pendidikan akuntansi tidak selalu harus dibagian keuangan karena dengan latar belakang pendidikan lain pun bisa melaksanakan laporan keuangan dengan baik dengan bekal selalu mengikuti pelatihan dan Bimtek Akuntansi Berbasis Akrual, walau sebenarnya akan lebih mudah memahami mengenai akuntansi adalah pegawai yang mempunyai pengetahuan akuntansi minimal D3 Akuntansi.

2. Aspek Laporan Keuangan

Dari hasil penelitian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dengan dukungan dan kerja sama semua pegawai bagian keuangan dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maka Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Akrual dan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2017 tentang kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual dalam laporan keuangan Dinas Sosial.

3. Aspek Eksteren

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Sosial telah menerapkan akuntansi berbasis akrual yang akuntabilitas, transparansi keuangan terhadap masyarakat (publik) yang memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu hak untuk mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu, hak untuk diberi informasi yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan public, dan semua itu telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Timur dengan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga non public dengan media massa sebagai sarana arus informasi buat masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan saran yang dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu:

a) Aspek Interen

Saran peneliti sehubungan dengan hasil dari penelitian ini yaitu dalam upaya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebaiknya dalam menerapkan SAP berbasis akrual perlu adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengenai SAP berbasis akrual, misalnya sosialisasi atau pelatihan yang lebih rutin lagi, selain itu perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi agar lebih mempermudah penerapan akuntansi berbasis akrual.

b) Aspek Laporan Keuangan

Saran peneliti sehubungan dengan hasil dari penelitian ini yaitu dalam hal upaya menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan serta menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kiranya perlu adanya upaya akselerasi sinkronisasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan peraturan lokal di pemerintah daerah.

c) Aspek Eksteren

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Halim. 2008. *Auditing (Dasar-dasar Laporan Keuangan) Edisi Keempat*, Yogyakarta : Unit Penelitian dan Percetakan STIM YKPN
- Arif, Bahtiar. 2009, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Akademia
- Baswir, Revrison. 1998. *Akuntansi Pemerintah Indonesia. Edisi 3*. Yogyakarta : BPF.
- Bastian, Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta :BPF UGM
- Bastian Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta
- Bastian, Indra.2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*, Penerbit Erlangga : Jakarta
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Predana Media Group
- Danim,S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia.
- Dedi Nordiawan dkk, 2007. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Edward, Marilee C, III. 2006. *Implementing public Policy*, Washington Dc : Congretional Quarterly Press
- Halim dan Kusufi, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat
- Harjowiryono, Marwanto. Dkk, 2014. *Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis AkruaI pada Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintahan Pusat*, Jakarta : Kementrian Keuangan
- International Federation of Accountants (IFAC). 2002, *Public Sector Committee. Study 14, Transition to the Accrual basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (Second Edition)*.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta : UIP.

Mahmudi. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.

Nordiawan, dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : salemba Empat

Nurlan Darise, 2009. *Pengelolaan Keuangan daerah Untuk Eksekutif dan Legislatif*, Jakarta : Indeks

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Aturan Hukum

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (1) tentang Keuangan Negara

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bab XI Tentang Akuntansi Keuangan Daerah Pasal 232

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual, Paragraf 21

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual, Paragraf 25

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual, Paragraf 28

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah daerah

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Sumber Lainnya

Wikiapbn, 2016. Standar Akuntansi Pemerintahan. <http://www.Wikiapbn.org/standar-akuntansi-pemerintahan/>. 20 Januari 2018

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Waktu Wawancara :
4. Lama Wawancara :

B. Tanggapan Informan

Pertanyaan umum mengenai Penerapan akuntansi berbasis akrual di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilihat dari Aspek Internal (Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana), Laporan Keuangan, dan Aspek Eksternal (Instansi terkait dan Masyarakat)

1. Aspek Interen

- a) Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual maka sumber daya manusia di Dinas Sosial sudah memadai ?
- b) Terkait dengan jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual apakah sudah memadai ?
- c) Bagaimana dengan kualitas pegawai bagian keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual,

- d) Jelaskan mengenai Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang aktivitas kerja Terkait dengan penyusunan laporan keuangan

2. Aspek Keuangan

- a) Bagaimana Peranan laporan keuangan berbasis akrual untuk Dinas Sosial.?
- b) Bagaimana peran dan tanggung jawab pimpinan dalam proses penyusunan pertanggung jawaban laporan keuangan berbasis akrual
- c) Bagaimana peran dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Keuangan dalam proses penyusunan pertanggung jawaban laporan keuangan berbasis akrual ?
- d) Bagaimana peran dan tanggung jawab sebagai verifikasi perbendaharaan dinas sosial dalam proses penyusunan pertanggung jawaban laporan keuangan berbasis akrual ?
- e) Bagaimana peran dan tanggung jawab sebagai bendahara pengeluaran dinas sosial dalam proses penyusunan pertanggung jawaban laporan keuangan berbasis akrual ?
- f) Terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual (Jelaskan)

- g) Bagaimana mekanisme sistem akuntansi keuangan berbasis akrual di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ?

3. Aspek Eksternal

- a) Apa manfaat laporan keuangan berbasis akrual dilihat dari aspek eksternal ?
- b) Dalam aspek eksternal maka siapa saja dapat mendukung kesuksesan dalam Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual ?

PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Tempat Observasi

1. NamaTempat :
2. Alamat :
3. Waktu Observasi :

B. Hal-Hal Yang Diobservasi

1. Ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam penerapan akuntansi berbasis akrual

2. Kondisi tempat proses pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual

3. Yang menjadi penghambat dalam penerapan akuntansi berbasis akrual

4. Peraturan daerah yang mengatur tentang penerapan akuntansi berbasis akrual

5. Kesimpulan Observasi

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

A. IdentitasTempat Pengambilan Dokumen

1. NamaTempat :
2. Alamat :
3. Waktu Pengambilan:

Dokumen

B. Dokumen Umum

- | 1. | Struktur Organisasi | | Keterangan |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> | Tersedia | <input type="radio"/> | TidakTersedia <input type="text"/> |
| 2. | Sejarah Organisasi | | |
| <input type="radio"/> | Tersedia | <input type="radio"/> | TidakTersedia <input type="text"/> |

C. Dokumen Yang Berhubungan Dengan Penerapan Akuntansi

Berbasis AkruaI

1. Dokumen/arsip peraturan yang berhubungan dengan penerapan

akuntansi berbasis akruaI

Tersedia TidakTersedia

2. Data SOP penerapan akuntansi berbasis akruaI

Tersedia TidakTersedia

3. Dokumentasi foto/foto pada saat proses penerapan akuntansi berbasis akrua

Tersedia Tidak Tersedia

LAMPIRAN

Wawancara dengan Drs.Hi Rudy Suardi Malah Selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur



Wawancara Bersama Dengan Bapak Ayko Mentemas, SE,MM Selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial



**Wawancara dengan Ibu Yuli Modeong, SE Selaku Verifikasi dan
Perbendaharaan**



**Wawancara bersama dengan Ibu Nana Potabuga selaku Bendahara
Pengeluaran Dinas Sosial**



**Wawancara dengan Diana Modeong selaku Staf Seksi Pelaporan
Keuangan Dinas Sosial**



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Penulis : MASLINDA PAPUTUNGAN
Tempat dan Tanggal Lahir : Tutuyan, 16 Agustus 1974
Alamat : Desa Tutuyan II Kecamatan
Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
No. HP : 0822-9242-0128
Alamat Email : meilindapaputungan@gmail.com
Status : Menikah
Nama Instansi : Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Alamat Instansi : Jalan Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan

Riwayat Pendidikan : - SD Lulus Tahun 1987
- SMP Lulus Tahun 1990
- SMA Lulus Tahun 1994
- Masuk STIA LAN Makassar Tahun 2014

Riwayat Pekerjaan : PNS Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Jabatan : Staf
Pangkat/Golongan : Pengatur II/a :